

**PARTISIPASI POLITIK
PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019
DI KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nahdla Hendrajati
NPP. 30.0707

Asdaf Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : nahdlahendrajati@gmail.com

ABSTRACT

Problem: A country must be able to guarantee that every citizen gets equal treatment. Political participation influences the course of government policy directly or indirectly. Elections are considered as a form of political participation. Election quality is assessed by guaranteeing the equal rights of all citizens in all matters relating to the electoral process. Including the rights of voters with disabilities. **Purpose:** This study aims to determine the level of political participation of voters with disabilities in the 2019 Presidential Election in Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. **Method :** The research method used is descriptive qualitative research. The theoretical basis used in this study is Ramlan Surbakti et al (2011). **Results:** The results of this study indicate that Ngargoyoso District, Karanganyar Regency has a low level of political participation of voters with disabilities because it does not reach 20%. **Conclusion:** Voters with disabilities do not want to attend polling stations and do not want to exercise their right to vote, and the lack of socialization provided by the KPU specifically for voters with disabilities.

Keywords: political participation, electoral, and disabled people

ABSTRAK

Permasalahan : Suatu negara harus dapat menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh perlakuan yang sama. Partisipasi politik mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu dianggap sebagai bentuk partisipasi politik. Kualitas pemilu dinilai dengan adanya jaminan yang sama atas hak seluruh warga negara dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pemilu. Termasuk hak pemilih penyandang disabilitas. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Ramlan Surbakti Dkk (2011). Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Ramlan Surbakti Dkk (2011). **Hasil** : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar memiliki tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yang rendah karena tidak mencapai 20%. **Kesimpulan** : Pemilih penyandang disabilitas tidak ingin hadir ke TPS dan tidak mau untuk menggunakan hak pilihnya, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KPU yang dikhususkan untuk pemilih penyandang disabilitas.

Kata Kunci : partisipasi politik, pemilu, dan penyandang disabilitas



I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Partisipasi dalam politik adalah salah satu komponen kunci demokrasi. Partisipasi dalam politik lebih mementingkan tindakan yang diambil orang daripada keyakinan politik mereka. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi hasil keputusan yang harus diambil pemerintah agar menguntungkan. Partisipasi politik jenis ini mempengaruhi arah kebijakan pemerintah, berdampak pada kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu negara harus dapat menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh perlakuan yang sama. Setiap orang pasti memiliki kekurangan baik dari segi manapun. Salah satunya yaitu ada sebagian orang yang harus hidup dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan seperti penyandang disabilitas. Mereka memiliki kekurangan fisik dan atau mental yang menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan yang selayaknya. Keadaan ini tidak berarti bahwa penyandang disabilitas kehilangan martabatnya atau kesejahteraannya tidak dapat dibandingkan dengan warga negara lain, yaitu dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Penyandang disabilitas pastilah memiliki kewajiban, hak, kedudukan dan tempat yang sama dengan warga negara lain tanpa diskriminasi sedikit pun. Pemberdayaan kedudukan orang-orang yang memiliki kekurangan pada dirinya, dalam suatu pembangunan nasional membutuhkan

perhatian khusus. Kekurangan fisik dan/atau mental menimbulkan terganggunya fungsi tubuhnya.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ada 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dengan hasil presentase partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tertinggi adalah Kecamatan Colomadu dengan besar 38,38% dan presentase partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas terendah terdapat di Kecamatan Ngargoyoso. Di kecamatan Ngargoyoso jumlah pemilih penyandang disabilitas berjumlah 29 pemilih tetapi hanya 4 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sehingga persentase partisipasi politik penyandang disabilitas hanya mencapai sebesar 13,79%. Persentase tersebut berada pada angka partisipasi politik penyandang disabilitas terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Karanganyar.

Pada kegiatan pemilihan presiden secara langsung, suatu partisipasi politik dari masyarakat sangat diperlukan. Seluruh masyarakat berhak untuk mengeluarkan hak politiknya termasuk penyandang disabilitas. Sekecil apapun suara penyandang disabilitas sangat mempengaruhi hasil pemilihan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Siti Handayani berjudul Partisipasi Politik Kaum Difabel Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 (Handayani, 2018) menemukan bahwasanya ketidakmerataannya partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas yang masih minim dan pasif, serta kontrol yang masih rendah. Penelitian Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum berjudul Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember Mais, A., & Yaum, L. A. (2019) ditemukan bahwa KPU masih berupaya melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilu guna mendorong dan melayani hak pilih disabilitas. Penelitian Umi Mahmudah berjudul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta (Mahmudah, 2019) ditemukan upaya menciptakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, sosialisasi berupa pemberian pemahaman tentang pemilu, simulasi tata kelola bagaimana mencoblos yang baik dan benar, bekerja sama dengan para relawan demokrasi, masyarakat setempat RT/RW, Bawaslu, PPS dan KPPS.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Presiden. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif

dipilih oleh peneliti hampir sama dengan penelitian sebelumnya namun berbeda pada indikator yaitu dengan menggunakan teori dari Ramlan Surbakti Dkk mengenai kegiatan memilih dan dipilih dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

1.5 Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh Peneliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa partisipasi politik dan untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

II. Metode

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Sugiyono (Sugiyono, 2017). mengatakan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kegiatan Memilih dan Dipilih

Rendahnya presentase pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Karanganyar ini disebabkan karena banyaknya penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, mereka tidak hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara meskipun sudah tercatat dalam Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Karanganyar. Pihak penyelenggara sudah memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Baik itu sarana dan prasarana, begitu juga dengan pengetahuan tentang pemilu. Sehingga pihak penyelenggara sudah mengusahakan apa yang bisa diusahakan, namun belum maksimal dalam pengaplikasiannya. Masyarakat penyandang disabilitas merasa malu dianggap sebagai pemilih. Selain itu, ada keluarga di lingkungan komunitas disabilitas yang melarang anggota keluarga yang masuk kategori disabilitas untuk mencoblos Pilpres 2019 di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

3.2 Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan

Sebagian masyarakat ada yang ikut memilih dan ada yang tidak, sedangkan sistem yang ada sudah disesuaikan dengan standar nasional. Ada pemilih penyandang disabilitas yang mengikuti organisasi masyarakat dan komunitas atlet disabilitas akan tetapi ada juga yang tidak bergabung dengan organisasi masyarakat. Terdapat kesempatan bagi pemilih

penyandang disabilitas untuk menyuarakan pendapatnya dan mempengaruhi partai politik, tetapi mayoritas pemilih penyandang disabilitas enggan untuk melakukan hal tersebut dengan alasan tidak mau ribet. Pencoblosan masih belum diikuti dengan baik oleh banyak pemilih difabel. Setelah pemilu, pemilih difabel tidak berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Informasi tentang pendidikan politik yang diterima oleh pemilih penyandang disabilitas masih sangat minim dan juga dari pihak keluarga yang belum paham mengenai pentingnya menggunakan hak pilih menjadikan angka partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas masih rendah.

Penyandang disabilitas belum sepenuhnya disikapi KPU karena belum ada verifikasi data faktual yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Bagi mereka yang mengasuh penyandang disabilitas, sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim. Hal ini membuat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam politik di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, untuk Pilpres 2019 cukup rendah.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kegiatan pemilihan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas rendah bukan hanya disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat penyandang disabilitas tentang berpartisipasi politik, namun

terdapat faktor lain yaitu seperti banyaknya masyarakat penyandang disabilitas yang merasa malu bahwa mereka dikategorikan sebagai pemilih penyandang disabilitas, selain itu keluarga dari masyarakat penyandang disabilitas tidak mengizinkan anggota keluarga mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Bukan hanya pada tahapan kegiatan memilih atau dipilih tapi juga ada tahapan pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Pada tahapan pelaksanaan pemilihan banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak mengikuti tahapan pemilihan tersebut. Pemilih penyandang disabilitas juga pasif dalam proses pengambilan keputusan setelah tahapan pemilihan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Jaminan berbagai bentuk pelayanan harus diberikan kepada pemilih penyandang disabilitas. Hal ini untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. salah satunya dalam bentuk sosialisasi pemilihan. Sosialisasi diberikan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang haknya dalam berpartisipasi politik pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Namun pada pelaksanaannya pihak penyelenggara yaitu KPU kekurangan sumber daya manusia yang

berkualitas dalam menyampaikan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas hal ini yang menyebabkan tidak tersampainya pengetahuan politik kepada pemilih penyandang disabilitas sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat penyandang disabilitas tentang berpartisipasi politik

IV. Kesimpulan

Masyarakat pemilih penyandang disabilitas bisa dibilang masih sangat pasif, merasa malu dan apatis terhadap peristiwa politik yang terjadi. Pihak keluarga yang juga belum bisa menjadi pendukung dari pemilih penyandang disabilitas. Kegagalan pemilih sendiri untuk hadir di TPS dan keputusan mereka untuk abstain karena merasa tidak berkepentingan dengan pemilu. Dari sisi keluarga, masih minimnya dorongan bagi pemilih difabel dan minimnya komunikasi yang terbuka tentang informasi menyebabkan sebagian pemilih difabel belum bisa mencoblos di Pilpres 2019. Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang direncanakan KPU secara tegas bagi pemilih difabel menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat keterlibatan politik pemilih difabel dengan kurangnya tenaga ahli di bidangnya

Keterbatasan penelitian. penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Lokus sebagai studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ramlan Surbakti tentang kategori partisipasi.

Arah masa depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan mengubah pola pikir masyarakat penyandang disabilitas, menambah dan memaksimalkan pendidikan politik dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas, supaya mereka lebih peduli terhadap kegiatan pemilihan yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Dan melakukan sosialisasi khusus untuk pemilih penyandang disabilitas dan juga kepada pihak keluarga guna meningkatkan kesadaran memilih. Dengan harapan pihak keluarga bisa mengerti dan memahami pentingnya partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas. KPU juga diwajibkan memberikan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia kepada jajaran yang ada dibawahnya untuk menjunjung tinggi hak-hak pemilih penyandang disabilitas.

V. Ucapan Terimakasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor IPDN beserta seluruh jajaran, Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Bapak Teguh Ilham, S.STP, M.Si. selaku Ketua Program Studi Politik Indonesia Terapan IPDN, Bapak Dr. Tri Raharjanto, S.STP, M.Si., MH. Selaku Pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, nasehat, dan waktu selama penelitian Proposal Skripsi. Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga

Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Rekan-rekan Praja Utama Jawa Tengah angkatan XXX, Adik-adik Praja kontingen Jawa Tengah angkatan XXXI, XXXII, dan XXXIII yang selalu memberikan dukungan untuk peneliti, Rekan-rekan kelas A5 yang selalu ada untuk menjadi sahabat terbaik selama masa pendidikan ini, Saudara-saudara KARES SOLO XXX yang selalu ada dan menemani peneliti sedari masa-masa susah muda praja, Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas seluruh bantuan, dukungan serta doa yang diberikan.

VI. Daftar Pustaka

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Handayani, S. (2018). *Partisipasi Politik Kaum Difabel Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017*. 1–6. <http://repo.apmd.ac.id/442/>
- Mahmudah, U. (2013). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>